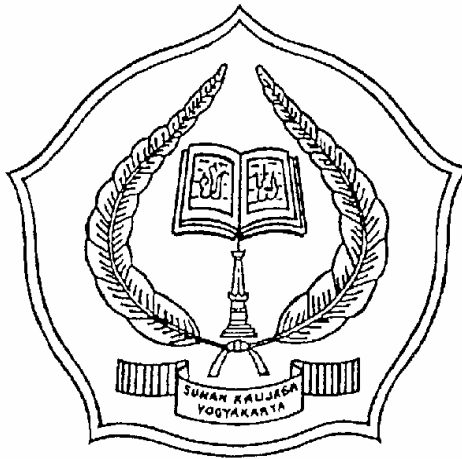


**RELASI SOSIAL ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH
PEKALONGAN DALAM PROSES PASCA PILKADA
(STUDI KASUS GAMBAR MESUM QOMARIYAH-PONTJO)**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh:
Muh. Syafik
03541453-02

Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2008

Surat Pernyataan

Nama : Muh. Syafik
NIM : 03541453-02
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama
Alamat Asli : Jl. Raya Remban 360 Rt. 01/04 Srawan Pekalongan Jateng
Alamat Sementara : Astama Svukran, Jl. KH. Ali Maksum 272 Krapyak Yogyakarta
Judul Skripsi : Sikap Politik Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Pekalongan (Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah diujikan dalam Munaqasyah dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan berkenan mengulang munaqasyah
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 07 April 2008.

Saya yang menyatakan,

Muh. Syafik

Nota Dinas

Dr. Amin, Lc., M.A

Dr. Munawwar Ahmad, S.S., M.Si

Dosen Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Hai : Skripsi Sdr. Muh. Syafik

Lam : 4 (Empat) Eks. Skripsi

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing utama dan pembantu pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Syafik

NIM : 03541453-02

Judul : Sikap Politik Ulama NU Dan Muhammadiyah Pekalongan Terhadap Kepemimpinan Bupati Wakil Bupati (Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pentjo)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2008

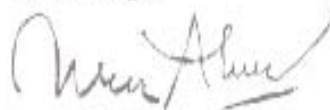
Pembimbing I



Dr. Amin, Lc., M.A

NIP. 150253468

Pembimbing II



Dr. Munawwar Ahmad, S.S., M.Si

150321646



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/0733/2008

Skrripsi dengan judul: **RELASI SOSIAL ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH PEKALONGAN DALAM PROSES PASCA PILKADA**
(Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo)

Diajukan oleh:

1. Nama : Muh. Syafik
2. NIM : 03541453-02
3. Program Sarjana Strata Satu Program Studi : Sosiologi Agama

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Kamis, 17 April 2008 dengan nilai: 84,33 (B+) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang: Penguji II

Dr. Amin, Lc., M.A.
NIP. 150253468

Penguji I

Drs. Chumaidi Syarif Romasy, M.Si
NIP. 150198449

Sekretaris Sidang

Dr. Munawwar Ahmad, S.S., M.Si
NIP. 150321646



Yogyakarta, 30 April 2008

Dr. Seto Ariyanto, M.A.
NIP. 150232693

Abstrak

Kasus menarik muncul dari gegap gempita perhelatan Pilkada langsung perdana Kabupaten Pekalongan 2006. Menjelang momentum pemilihan, publik dikejutkan oleh peredaran gambar-gambar tak senonoh dengan dua aktor yang berwajah mirip dengan Dra. Qomariyah, M.A, dan Ir. Wahyudi Pontjo, M.T, pasangan kandidat Bupati-Wakil Bupati Pekalongan. Awalnya mayoritas masyarakat mengasumsikannya sebagai upaya fitnah dan *character assassination* terhadap figur Qomariyah-Pontjo. Tak ayal keduanya malah sukses memenangkan Pilkada dan memimpin Kab. Pekalongan. Namun perkembangan persidangan perkara gambar mesum seolah membenarkan muatan gambar (perselingkuhan).

Kontroversi sosial politik berkembang. Integritas moral Bupati-Wabup dipersoalkan. Uniknya sebagai kota “SANTRI” dengan penduduk hampir 100 % memeluk Islam, masyarakat, termasuk elit keagamaannya (ulama), tampak tidak cukup memedulikan perkara ini,. Dua ormas Islam terbesar di Pekalongan yaitu NU dan Muhammadiyah pun tidak berikhtiar melakukan klarifikasi secara terbuka. Karenanya, penelitian ini mencoba menguak bagaimana pola relasi sosial ulama NU dan Muhammadiyah pasca munculnya tuduhan tindak amoral. Juga menyibak faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan tindakan sosial mereka atas kasus ini.

Riset ini mengkaji pemikiran dan tindakan sosial politik individu yang bersifat intrasubyektif dan intersubyektif dari aksi dan interaksi sosial. Metode riset adalah kualitatif dengan teknik analisis mikroskopik. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis ialah kombinasi antara teori “relasi Islam dan politik” dengan “relasi ulama dan politik (pemerintah)” dalam kerangka interaksionisme simbolis.

Riset ini menemukan variasi relasi sosial ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan terdiversifikasi dalam lima pola: 1) Antagonistis (menolak-pasif, kritis); 2) Reseptif (mutlak menerima, semiliberal)); 3) Konservatif berbasis primordial (inkar kasus-mendukung penuh, integratif); 4) Pasif konstitutif (pasrah kepada konstitusi, strategis); dan 5) Pasif Antagonistis (hati-hati dan menolak bersyarat).

Motto

If we had become a God, we could have achieved a real truth

Adalah kata yang mengubah dunia, maka abadikanlah ia dengan pena

Persembahan

Untuk Abah (Alm) dan Ibu, *my heroes*

Daftar Tabel:

- Tabel 2.1 : Jumlah perolehan suara PPP dan Golkar di lima kecamatan Kabupaten Pekalongan 1971-1992
- Tabel 2.2 : Jumlah dan prosentase perolehan suara parpol pada pemilu 1977-1992
- Tabel 2.3 : Jumlah surat suara sah pada Pemilu 1977-1992
- Tabel 3.1 : Perolehan suara Parpol pada Pemilu 2004 untuk pemilihan anggota DPRD II Kabupaten Pekalongan
- Tabel 3.2. : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Cabup-Cawabup Pekalongan
- Tabel. 3.3 : Laporan Dana Kampanye Pasangan Cabup-Cawabup Pekalongan
- Tabel 4.1 : Kategorisasi dan Karakteristik kyai menurut Suprayogo
- Tabel 5.1 : Tipologi sikap politik ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan Terhadap Kepemimpinan Bupati-Wabup Pasca Persidangan Kasus Gambar Mesum

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Nota Dinas	iv
Abstrak	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar isi	ix
Kata Pengantar	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian	24
1. Subyek Penelitian	25
2. Lokasi Penelitian	25
3. Penentuan Informan	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
A. Observasi.....	27
B. Wawancara Mendalam.....	28
C. Dokumentasi	28
G. Analisis Data	28
H. Sistematika pembahasan	29
BAB II. PROFIL SOSIOLOGIS KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Sekilas Latar Historis	31
1. Asal-Usul Nama Pekalongan	36
1. Masa Pergerakan Kemerdekaan	38
B. Legenda Masyarakat	40
C. Potret Geografis dan Demografis	42
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Kondisi Demografis dan Sosial Budaya	44
D. Dinamika Sosial Politik Lokal Pekalongan	48
1. Partisipasi Politik Masyarakat	51
2. Konflik Politik Lokal.....	57

**BAB III. PROSES DAN PASCA PILKADA PERDANA KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM KONTROVERSI**

A. Situasi Sosial Pekalongan	71
B. Ulama dan Pilkada (Pekalongan)	73
C. Relasi NU dan Muhammadiyah Dalam Pilkada	79
D. Pilkada Sebagai Peristiwa Politik	84
F. Polemik Dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan.....	97
1. Kronologi Persebaran Gambar Mesum	102
G. Perkembangan Mutakhir Kasus Gambar Mesum	112

**BAB IV. VARIASI RELASI ULAMA NU
DAN MUHAMMADIYAH PEKALONGAN PASCA PILKADA**

A. Respon Ulama Terhadap Gambar Mesum Bupati-Wabup Pekalongan	118
B. Analisis Dramaturgis Atas Perilaku Pejabat Publik.....	123
C. Variasi Relasi Sosial Ulama NU dan Muhammadiyah Pasca Pilkada Kontroversial	128
1. Manifestasi	141
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi.....	143

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	150
B. Saran-Saran	
1. Akademis	154
2. Praksis Sosial dan Kebijakan Publik	154
C. Refleksi Akhir	156

DAFTAR PUSTAKA	157
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kata Pengantar

Sembah sujud syukur di haribaan Allah *Azza Wa Jalla*, Sang Hyang Widi penguasa alam raya, Sang Maha Alim yang mengajari hamba-Nya dengan *qalam*. Tanpa setetes ilmu, kasih, dan kuasa-Nya mustahil penulis mampu menuntaskan karya sederhana ini. Dalam kepatahasaan, secercah hidayah-Nya lah yang mampu membangkitkan. Salam *ta'dhim* terhaturkan kepada Muhammad Saw, pengubah sejarah pola kehidupan manusia, revolusioner teragung sepanjang masa. Ia lah penyampai wahyu yang konsisten dalam kejujuran, terpercaya selama hayat, dan dikaruniai kecerdasan berlipat. Ia panutan dan rahmat bagi umat semesta tanpa pandang identitas personal dan sosialnya. Shalawat juga tersampaikan kepada para kerabat, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi bertajuk “Relasi Sosial Ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan Dalam Proses Pasca Pilkada (Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo)” ini merupakan ikhtiar awal penulis mendalami sosiologi. Tanpa dukungan dan bantuan banyak komponen, tak ada garansi karya ini mampu hadir. Oleh karenanya, rasa hormat dan ungkapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu kelancaran proses riset dan penulisan skripsi ini.
2. Soehada, S.Sos, M.Hum, selaku ketua Prodi Sosiologi Agama, yang telah mempertemukan penulis dengan dua dosen muda progresif untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi.

3. Dr. M. Amin, Lc., M.A, sebagai pembimbing utama, *munsyi* (ahli bahasa) UIN Sunan Kalijaga yang dalam kepadatan agendanya masih berkenan meluangkan diri untuk memberi arahan kepada penulis. *Jazakumullahu*.
4. Dr. Munawwar, M.Si, selaku pembantu pembimbing, yang mendorong penulis untuk berkenalan dengan “benda asing” semiotika (meski teori itu akhirnya dimentahkan penguji). *Thank you very much Sir*.
5. Drs. H. Moehamad Damami, M, Ag, selaku penasehat akademik yang senantiasa bersedia membuka ruang konsultasi bagi penulis selama studi.
6. Seluruh Informan riset dari pihak PCNU Kab. Pekalongan, PDM Kab. Pekalongan, DPD PAN, DPC PKB, KPUD Kab. Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan, FPMKS, dan lainnya. Semoga Allah membalas Anda.
7. Seluruh Karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah propinsi DIY, Perpustakaan Ignatius Kolsani, dan Perpustakaan Mabulir. Mereka adalah penjaga warisan peradaban yang wajib dihargai.
8. Abah H. Syeirozi (Alm.), semoga kuburmu adalah bagian dari taman surga. Ibu Hj. Istiqomah, pejuang hidupku, yang berkenan mengorbankan segalanya demi anak-anak. Bu’, saya berikrar, “cucuran keringatmu, sebabnya matamu, dan lepuhan kakimu demi putramu, tak akan sia-sia.” Kepada Mbak Fat, Mbak Lik, Mbak Ida, Mas Towi, Mbak Idhoh, Mas Olid, terima kasih atas *support* moral spiritual sehingga adikmu mampu menuntaskan tugas belajar. Untuk keponakan-keponakan yang nakal dan lucu, tawa kalian adalah penggugah motivasi.
9. Kawan-kawan di LPM ***Arena*** UIN Sunan Kalijaga (Utun, Maf, J-Jn, Acit, Adi, Ya2, Ki2, Hilma, Fid, Ziz, dan sebagainya). Yak inilah kawan, jerih payah kita takkan hampa makna. *Majalahe ndang dirampungne dab!*

10. Teman-Teman di Komite Pesantren Anti-Narkoba (KPAN) Yogyakarta, *wa bi al-khusus*, yang terhormat Ibu Hj. Ida Fatimah, Z.A, M.S.I. Juga kepada Kang Ikhsan sang ustadz riset, Saefuddin pejuang anti-narkoba, Adib penjaga klinik, dan seluruh *volunteer* yang membantu kerja organisasi.
11. Terima kasih untuk Pak Kos, Bu Kos, dan kedua putranya yang menyediakan ruang nyaman untuk penulisan skripsi. Untuk kawan-kawan yang setia menghampiri penulis kala penat dan senyap: Miski, Tamam, Soegie, Saeful, Fiq-Wul, Fika, Habibi (*Suwun printere*), dan lain sebagainya yang tak tertuliskan di sini.

Skripsi ini awalnya berjudul “Sikap Politik Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati (Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo)”, namun judul tersebut tidak disetujui oleh penguji saat ujian. Hingga akhirnya, inilah yang hadir di hadapan pembaca. Asa penulis, skripsi ini tidak sekadar bermanfaat bagi penulis, namun mampu menjadi secercah cahaya, meskipun temaram, di tengah carut marut realitas politik bangsa. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian hingga penulisan skripsi ini, penulis hanya mampu mengucapkan salam terima kasih, *jazakumullahu ahsanal jaza*, amin.

Yogyakarta, 23 April 2008

Penulis

Muh. Syafik

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Kabupaten Pekalongan yang berlangsung sepanjang April-Mei 2006, memunculkan kasus mengejutkan. Menjelang berakhirnya masa kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) periode 2006-2011, beredar luas foto-foto adegan mesum dengan pelaku yang berwajah sangat mirip pasangan Cabup-Cawabup, Dra. Hj. Siti Qomariyah, MA dan Ir. H Wahyudi Pontjo Nugroho, MT., yang populer dengan akronim “QONCO”, hasil koalisi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Saat gambar-gambar tersebut tersebar, masyarakat pendukung “Qonco” menengarainya sebagai rekayasa kampanye hitam (*black campagne*) yang dimunculkan rival politik untuk menghambat laju pasangan ini. Karenanya, pemilihan yang dihelat pada 21 Mei 2006 justru dimenangkan pasangan yang foto-foto perselingkuhannya tersebar itu.¹ Namun setelah foto-foto itu diteliti

¹ Dalam pengamatan penulis, faktor moralitas dan kesalihan personal (secara *dzahiry*) Dra. Hj. Siti Qomariyah, M.A. yang sebelumnya menjabat Wabup Pekalongan 2001-2006, menjadi alasan terkuat atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap gambar mesum itu. Profesiya sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, juga Alumni PP Manbaul Maarif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dan hingga kini masih menjabat Ketua Muslimat NU Kabupaten Pekalongan (Sumber: “Profil Bupati dan Wakil Bupati”, <http://www.pekalongan.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=print&ceid=8-4k>. Download: 09-02-2007), kian mengukuhkan keyakinan masyarakat bahwa nyaris mustahil Qomariyah melakukan perselingkuhan amoral itu.

pakar multimedia, Roy Suryo –yang kemudian menjadi saksi ahli di persidangan, dinyatakan bahwa 13 dari 21 foto dinyatakan asli.²

Pasca itu, pro kontra menyeruak. Kelompok masyarakat pendukung pasangan Cabup-Cawabup Drs. H. Amat Antono dan H.A. Qurafi Hajjin (“AQUR”), B.A., pesaing Qomariyah-Pontjo dalam Pilkada, lantas membentuk Forum Peduli Masyarakat Kota Santri (FPMKS) dengan agenda utama penolakan hasil pilkada dan mendesak penundaan pelantikan hingga proses hukum kasus tersebut tuntas. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa sumber di Pekalongan, aksi massa kerap dilakukan. Sebaliknya, pendukung pasangan terpilih mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Ma'ruf, untuk segera menginstruksikan pengangkatan. Akhirnya Gubernur Jateng pada tanggal 26 Juni 2006, melantik Qomariyah-Pontjo sebagai Bupati-Wakil Bupati Pekalongan periode 2006-2011.³

Argumentasi yang sering mengemuka untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan Qomariyah-Pontjo adalah kecacatan moral privasi. Memang pengadilan tidak menghakimi (“tersangka”) pelaku gambar mesum itu, yang justru berposisi sebagai korban.⁴ Namun menyimak surat dakwaan jaksa,

² “Kasus Foto Porno Cabup/Wabup Pekalongan Ditangani Polda”, <http://www.gatra.com/2006-05-26/artikel.php?id=94791>, Download: 06-02-2007

³ “Demo Tolak Pelantikan Bupati Nyaris Rusuh. Kasus Bupati Pekalongan”, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/27/nas10.htm>, Download: 06-02-2007

⁴ Terdakwa persidangan kasus ini adalah Bethara (pegawai gerai seluler) dan Drs H. Sudyantoro (mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dan pendukung Antono-Qurafi dalam kampanye Pilkada. Keduanya dijerat Pasal 282 KUHP ayat 2, yakni menyiarkan, mempertontonkan, menyebarkan gambar/foto di muka umum yang melanggar kesusilaan. (“Terdakwa Kasus Foto Mesra Disidangkan di PN Pekalongan”, Media Indonesia Online, Kamis, 27Juli, 2006, 07:32WIB, <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=107121>, Download: 09-02-2007). Sedangkan Pontjo dijerat sebagai tersangka produsen gambar yang melanggar kesusilaan.

terungkap bahwa terdakwa Bethara mendapatkan gambar-gambar dari telepon seluler (HP) milik Pontjo Nugroho, saat HP itu dibawa Pontjo ke gerai seluler tempat terdakwa bekerja untuk direparasi dan dipindahkan datanya ke HP yang lain. Setelah itu, gambar-gambar yang ditemukannya ditunjukkan kepada Ali Amliki, Amat Antono (Bupati Pekalongan saat itu), dan Sekretaris Daerah.⁵ HP tersebut lantas menjadi alat bukti persidangan.

Jika menilik bukti dan kesaksian sementara yang mengemuka –tanpa bermaksud menghakimi karena proses hukum masih belum tuntas, dari perspektif norma sosial lebih-lebih norma agama,⁶ legitimasi non struktural kepemimpinan pasangan Qomariyah-Pontjo memang patut dipersoalkan. Sebagai dua insan lawan jenis yang telah terikat perkawinan dengan pasangan masing-masing, tindakan mereka –terlepas apakah muatan gambar tersebut (perselingkuhan) benar-benar terjadi atau tidak— dalam patologi sosial merupakan wujud deviasi. Vembriarto mendefinisikan deviasi sebagai perilaku individu yang berbeda dan menyimpang dari tendensi sentral atau norma sosial masyarakat di mana dia merupakan bagian dan berinteraksi di dalamnya.⁷

Namun di sinilah keunikannya. Mayoritas masyarakat Pekalongan, termasuk elit keagamaannya, terkesan acuh tak acuh atas problem politik lokal

Namun persidangan perkara “produksi benda asusila” ini belum bisa dilaksanakan karena beberapa alasan (lihat bab III)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Term* norma sosial menurut Vembriarto: batas-batas variasi tingkahlaku yang secara eksplisit atau implisit dimiliki dan dikenal secara restrospektif oleh anggota kelompok, komunitas, atau masyarakat (St. Vembriarto, *Patologi Sosial*, [Yogyakarta: Andi Offset, 1984], hlm. 55).

⁷ Vembriarto, *ibid.*, hlm. 53

yang berkembang pasca Pilkada. Sekilas tampak ada semacam trik-intrik politis agar kasus tersebut tidak menyita perhatian besar mayoritas masyarakat. Padahal, kasus tersebut juga berimplikasi terhadap harmoni relasi NU dan Muhammadiyah. Mengingat sosok Qomariyah merupakan kader NU.

Label Kota SANTRI yang melekat pada Kabupaten Pekalongan selain kependekan dari “Sehat Aman Nyaman Tertib Rapi Indah” juga mengindikasikan bahwa Pekalongan adalah daerah yang berpenduduk nyaris 100 % beragama Islam. Hasil sensus penduduk tahun 2006 menunjukkan demikian. Dari total penduduk: 891.442, pemeluk agama Islam berjumlah 887.567. Artinya 99,57 % penduduk Pekalongan beragama Islam.⁸ Maka saat pasangan Qomariyah-Pontjo memperoleh dukungan non institusional dari mayoritas elit dan kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan segelintir elit Muhammadiyah, dua organisasi massa (Ormas) Islam terbesar di Pekalongan, khalayak luas cukup yakin terhadap kredibilitas Qomariyah-Pontjo, termasuk moralitas individualnya.

Ulama sebagai elit Islam yang ahli ilmu agama, dalam konfigurasi umat Islam (tradisional) cenderung diposisikan pada hirarki tertinggi dari stratifikasi sosial yang berbentuk piramida. Sebagai sumber utama sosialisasi nilai-nilai keislaman, yang menjalin relasi dengan umatnya melalui solidaritas yang lebih bersifat mekanis –dalam terminologi Durkheim,⁹ ulama memiliki kemampuan

⁸ *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2006*, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Bappeda Kab. Pekalongan, Juli 2007, hlm. 110-111

⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 17. Solidaritas mekanik timbul dari kesamaan-kesamaan dalam diri anggota masyarakat. Dalam tipe solidaritas ini,

cukup efektif untuk menggerakkan mobilitas sosial dan politik umatnya. Dalam masyarakat tradisional, berbagai keputusan dan praktik sosial politik anggota masyarakat seringkali ditentukan oleh ulama sebagai referensi. Meski seiring proses perkembangan sosial yang semakin kontraktual, rasional, dan menjurus pragmatis, otoritas politik ulama kian tergerus.¹⁰ Tapi menilik hasil Pilkada Pekalongan, fungsi ulama sebagai legitimator politik yang tercermin dari dukungan mayoritas elit NU, masih berpengaruh signifikan di masyarakat.

Salah satu fungsi utama ulama adalah penjaga moralitas kekuasaan. Menurut Horikoshi, ulama sebagai representasi nilai dan sakralitas agama yang luhur, harus berikhtiar seoptimal mungkin untuk memerankan idealitas ini. Secara personal ia harus meneguhkan citra diri sebagai seorang moralis, sementara sebagai pelindung dan sumber moralitas sosial ia harus tampil cerdik bila suatu kebijakan ditegakkan dengan mencederai keadilan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.¹¹ Bila peran ini mandeg, maka masyarakat tidak lagi merasa bersalah bila tidak mengindahkan instruksi ulama. Secara

individu lebur dalam kolektifitas dan tunduk dalam kehidupan bersama dengan dasar pengikat adalah kesamaan kesadaran (*similtude of conscience*). Masyarakat di sini dianalogkan layaknya badan yang terdiri atas bagian-bagian yang meliputi individu secara keseluruhan (Djuretna Imam Muhni, *Moral & Religi Menurut Durkheim dan Henry Bergson*, [Yogyakarta: Kanisius, 1994], hlm. 33-34)

¹⁰ Dalam lingkup yang lebih sempit, M. Asfar, melalui penelitiannya di beberapa pesantren di daerah Jawa Timur pasca Pemilu 1992 menyimpulkan adanya pergeseran otoritas pengaruh politik Kyai. Pola kepemimpinan Kyai terhadap santrinya yang selama ini lebih menganut otoritas tradisional –dalam klasifikasi Weber— yang terlihat dari relasi sosial yang bersifat personal dan vertikal, plus kepatuhan total santri terhadap Kyai, ternyata tidak berlaku dalam praktik politik santri pada Pemilu 1992. Ternyata banyak santri mencoblos partai yang berbeda dengan afiliasi politik Kyainya (M. Asfar, “Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai”, *Prisma*, No.5, 1995, hlm. 29-37).

¹¹ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terj. Umar Basalim & Andi Muarly Sunrawa, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 170

normatif, Islam telah menegaskan identitas ulama sebagai ahli waris Nabi (*waratsatul anbiya'*) dengan peran utama amar ma'ruf nahi munkar (Qs. Ali Imron:110). Islam dalam hubungannya dengan kekuasaan (negara), menurut sarjana penganut varian simbiotis, memang tidak menyediakan sistem ketatanegaraan detail, tetapi ia menghadirkan seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berbangsa-negara.

Menurut Sjadzali, di kalangan umat Islam terdapat tiga haluan pemikiran relasi Islam dan negara. *Pertama*, varian organik holistik yang berpendirian bahwa Islam adalah agama komprehensif yang serba mencakup, terdapat pula sistem ketatanegaraan atau politik. *Kedua*, haluan liberal sekularistik yang memandang bahwa Islam tidak berkaitan sedikitpun dengan tata kenegaraan. Dan *ketiga*, mazhab simbiotis yang lebih berwatak substantif.¹² Pemetaan ini hingga sekarang masih menjadi pendulum teoritis kajian relasi Islam-negara.

Mengutip Suprayogo, peran dan fungsi politik kyai atau ulama bersifat variatif. Mereka bisa memainkan fungsi legitimasi, integrasi masyarakat, dan fungsi kontrol.¹³ Sebagai penyandang tugas profetis, dalam kasus tersebut sebenarnya ulama pekalongan bisa mengoptimalkan fungsi *controlling* atau korektif berlandaskan etika Islam. Sebab, (tuduhan) perselingkuhan seksual

¹² Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 1-2. Agak mirip dengan pembagian di atas, dalam kasus agama Kristen, Ernest Troeltsch mengidentifikasi tiga tipe hubungan Gereja dan Negara: 1) Gereja Imperial: Kristen dan negara memiliki batas yang sama dan saling mendukung; 2) Gereja teritorial: organisasi keagamaan merupakan bagian dari masyarakat feodal yang terpecah-belah dan tunduk di bawah kekuasaan pemimpin sekuler, 3) Gereja Paus: hirarki keagamaan yang tidak bersatu dilawankan dengan beberapa negara Eropa Merdeka (Lihat: Betty R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein, [Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995], hlm. 160).

¹³ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 303

antara Bupati dan Wabup Pekalongan, seperti tersurat dalam gambar, jelas menerabas norma moral.¹⁴ Idealnya, ulama NU dan Muhammadiyah –sebagai dua ormas Islam terbesar— bersikap jelas terhadap perkembangan kasus itu untuk melakukan pendidikan etika berpolitik terhadap masyarakat dan elit politik lokal, sekaligus menjaga relasi harmonis antara kelompok NU dan Muhammadiyah .

Kendati hal ini bersifat privatif namun posisi Bupati-Wakil Bupati sebagai pejabat publik tentu menjadi pertimbangan khusus. Kecuali bila ulama Pekalongan benar-benar menganut mazhab sekular liberal yang memisahkan agama dengan persoalan kenegaraan sehingga meminggirkan segala hal yang berkaitan dengan moralitas berbasis agama ke ranah privat. Dalam dunia sekular, masyarakat tidak memiliki nilai-nilai yang berasal dari prakonsepsi agama tertentu untuk menjadi landasan bagi organisasi dan tindakan sosial,¹⁵ maka persoalan pelanggaran norma moral sosial privatif bukanlah materi yang perlu direspon serius.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah terpapar di atas, penelitian ini akan mengkaji tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

¹⁴ Norma moral adalah tolok ukur masyarakat untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia (secara konvensional), dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas (Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, [Yogyakarta: Kanisius, 1987], hlm. 19).

¹⁵ B.R. Wilson, “Agama dalam Masyarakat Sekuler”, dalam Roland Robertson (ed.), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Ahmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 190

1. Bagaimana proses sosial Kabupaten Pekalongan pasca Pilkada yang kontroversial?
2. Bagaimana pola relasi sosial ulama NU dan Muhammadiyah dalam proses pasca Pilkada yang kontroversial?
3. Faktor-faktor apa saja (agama, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik) yang mempengaruhinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pola relasi ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan pasca persidangan kasus penyebaran foto mesum Bupati-Wakil Bupati Pekalongan.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola relasi itu.
- c. Mengetahui implementasi riil sikap politik ulama terhadap kasus tersebut dalam konteks sosial politik Pekalongan .

2. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis penelitian ini akan berfaidah untuk:

1. Menakar peran politik ulama sebagai *the agent of power control and social change* dalam kontelasi sosial politik kontemporer.
2. Memperkaya khazanah kajian relasi Islam dan tata pemerintahan serta implementasinya dalam praktik politik lokal.

3. Menggali nilai-nilai moral Islam yang relevan dan *applicable* dalam percaturan sosial politik bangsa demi tegaknya demokrasi bermoral.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang relasi ulama dengan perkembangan sosial dan politik (lokal maupun nasional) di Indonesia amat banyak menghiasi khazanah kepustakaan. Sejauh penelaahan penulis atas beberapa sumber pustaka (buku dan jurnal), kajian yang paling kerap mengemuka adalah tentang “kiprah kyai dalam ranah politik praktis”, kemudian diikuti “peran kyai dalam proses perubahan sosial politik lokal”, dan ada beberapa pembahasan mengenai “sikap atau respon kyai terhadap realitas, gejala, ataupun sistem sosial politik tertentu”. Pendekatan yang digunakan meliputi disiplin sosiologi, antropologi, sejarah, politik, dan kombinasi keempatnya.

Beberapa buku untuk kategori pertama sebut saja *Tabiat Buruk Kyai NU*, laporan penelitian Shodiqin Nursa tentang konflik fisik antara massa pendukung PPP dan PKB di Kota Pekalongan menjelang Pemilu 1999. Kelahiran PKB yang dibidani oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ternyata memicu kemarahan sebagian warga NU yang menjadi elit atau pendukung PPP. Orasi-orasi provokatif dan saling serang yang disampaikan oleh kyai-kyai juru kampanye kedua partai, lantas memantik beberapa benturan fisik antar simpatisan. Menurut Nursa, faktor politisasi agama di lingkup internal partai merupakan penyebab konflik. Para kyai kedua partai

kerap menggunakan idiom-idiom Islam bahkan memelintir tafsir ayat al-Quran, untuk melegitimasi pihak mereka dan menjelekkan lawan.¹⁶

Karya Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, juga menerangkan keterlibatan kyai dalam politik praktis. Ia menemukan kesimpulan menarik dari risetnya di Jombang, Jawa Timur. Menurutnya, dimensi makrostruktural berpengaruh besar pada situasi mikrokultural masyarakat. Kendati menjalin relasi emosional dengan umatnya secara kokoh melalui kelembagaan pesantren maupun tarekat, pilihan partai politik kiai secara perorangan ternyata tidak diikuti oleh massa pengikutnya. Singkatnya, mengikuti langkah politik kiai bukanlah kewajiban umat Islam.¹⁷ Kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila oleh rezim Orba, diikuti keputusan NU kembali ke *Khittah* 1926 dianggap sebagai pemantik utama kenyataan tersebut.¹⁸

Suprayogo mencoba mengeksplorasi variasi bentuk keterlibatan dan peran politik kyai di pedesaan serta aktifitasnya dalam pengembangan pendidikan dan ekonomi umat. Ia memandang kyai sebagai fenomena kompleks yang tidak bisa diletakkan dalam satu varian tertentu. Selain sebagai tokoh spiritual teladan umat, demikian Suprayogo, kyai juga bisa menjelma menjadi “pemain” politik dan pelayan sosial. Beranjak dari argumentasi ini, ia mengelompokkan kyai dalam: 1) kyai spiritual; 2) kyai advokatif; dan 3) kyai

¹⁶ Shodiqin Nursa, *Tabiat Buruk Kyai NU, Kasus Kerusuhan Antar Warga NU di Pekalongan*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2005)

¹⁷ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. II, hlm. 321.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 319 & 322

politik adaptif, dan 4) kyai politik mitra kritis.¹⁹ Suprayogo memaklumkan keterlibatan kyai dalam politik praktis di pedesaan, sebab dalam *scope* tersebut ia tetap komitmen dengan pengembangan pesantren dan ekonomi umat. Selain itu, masyarakat juga mampu menjalin interaksi kritis dengan kyai. Bila kyai tidak konsisten dengan fatwa yang dicetuskan, kyai bisa ditinggalkan umat.²⁰

Pada level UIN, skripsi Marwan bertajuk *Peran Politik Praktis Kyai dalam Pemberantasan KKN di Sumenep Madura*, menganalisis kegagalan kyai mentransformasikan nilai-nilai spiritual seperti keadilan, amanat, dan sebagainya dalam praktik politik. Secara personal kyai memang “bersih” dan tidak tersangkut kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), namun posisinya sebagai pemegang puncak hirarki kekuasaan di organisasi politik, idealnya membuat kyai berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Namun menurut Marwan, idealitas itu gagal, sebab kyai tidak berbekal teori politik memadai.²¹

Sementara untuk kategori kedua perihal peran ulama dalam proses perubahan sosial politik, terdapat beberapa buku hasil *documentary research* maupun *field research*. Dengan pendekatan sejarah, Iskandar, Shalfiyanti, dkk, menganalisis keterlibatan riil ulama atau elit Islam pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pasca Agustus 1945. Buku itu menegaskan, ulama berfungsi signifikan memobilisasi masyarakat untuk bergerak menentang agresi militer asing. Masyarakat berkenan berpartisipasi

¹⁹ Imam Suprayogo, *Membaca Citra.....*, hlm. 298.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 301.

²¹ Marwan, *Peran Politik Praktis Kyai dalam Pemberantasan KKN di Sumenep*, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

aktif karena panutannya juga terlibat langsung. Di beberapa wilayah, pengaruh elit agama bahkan lebih mengakar daripada kaum bangsawan atau birokrat.²²

Penelitian Horikoshi terhadap pemimpin Islam lokal di Cipari, Garut, Jawa Barat, daerah yang merasakan *impact* terberat pemberontakan DI-TII (Daerah Islam/Tentara Islam Indonesia), dan masih rentan disusupi gerakan komunis, menampilkan konklusi menarik. Menyempurnakan teori *cultural broker*,²³ menurutnya, kemampuan Ajengan/Kyai sebagai mediator antara masyarakat muslim dengan Tuhan, masa kini dengan masa depan, situasi serba kacau dengan ketertiban, juga berfungsi mengenalkan simpul-simpul modernitas kepada masyarakat dan menggerakkan perubahan sosial. Kyai sangat diperlukan dalam proses transisi itu. Teknologi pertanian misalnya, diterima masyarakat setelah ulama/kyai mencobanya dan membuahkan hasil baik.²⁴

Karya monumental Dhofier, *Tradisi Pesantren*, terkesan apologis. Menurutny, kendati para kyai terikat kuat oleh pola pemikiran Islam klasik warisan ulama abad 7-13 M, namun mereka mampu menafsirkan serta berbenah diri untuk berperan dalam pembangunan bangsa, sehingga berwatak inklusif terhadap modernisasi. Dhofier menentang pendekatan dikotomis “modernis versus tradisional” yang melahirkan kesimpulan menyesatkan

²² Iskandar, Shalfiyanti, dkk., *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2000), hlm. 112-113

²³ Teori *cultural broker* (makelar budaya pasif) dilansir pertama kali oleh Clifford Geertz. Menurutny, kyai berperan sebagai filter atas arus informasi yang masuk ke masyarakat “santri”, menularkan apa yang dianggap bermanfaat dan membuang pengaruh yang cacat atau membahayakan. Namun, peran itu akan macet manakala arus informasi yang masuk sangat deras dan tidak mungkin disaring oleh kyai. (Lihat: Abdurrahman Wahid, “Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar”, kata pengantar dalam Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan.....*, hlm. xvi)

²⁴ Horikoshi, *Ibid.*, hlm. 232 & 245

bahwa modernisasi mengakibatkan peranan kyai hilang. Sebaliknya ia menawarkan pendekatan *continuity and change* (kesinambungan dan perubahan).²⁵ Sebagai peneliti yang dibesarkan di pesantren, Dhofier tentu sulit mengelak dari tuduhan subyektif-apologis.

Di tingkat UIN, Sri Rahayu Winaningsih, mahasiswi SA 2001, menulis hasil penelitian di sebuah desa di Mojokerto, Jawa Timur. Dengan mengambil perbandingan kasus pemilu 1999 dan 2004, ia mendapatkan kesimpulan, perilaku dan pilihan politik kyai pengasuh pesantren sangat berpengaruh terhadap pilihan politik para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Dari dua pemilu mutakhir di atas, kyai menjadi tambang suara partai politik tertentu.²⁶

Sementara, untuk kriteria ketiga terdapat buku hasil disertasi Masykuri Abdillah. Ia mendeskripsikan dan menganalisis respon intelektual muslim Indonesia –melalui perspektif pemikiran politik Islam— terhadap konsep-konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Abdillah, para cendekiawan muslim menerima konsep demokrasi walaupun tidak sepenuhnya sama dengan demokrasi liberal. Namun dalam artikulasi ide-ide demokrasi dan aspirasi umat, mereka bersikap fleksibel, terkadang kritis, namun di lain waktu akomodatif, tergantung posisi mereka *vis a vis* pemerintah.²⁷

²⁵ Dalam lingkup pesantren, pendekatan ini populer dengan adagium *al-muhafadhatu ‘ala al-qadimi al-shalihi wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlahi* (menjaga warisan klasik yang relevan dan menemukan inovasi baru yang lebih baik). Lihat: Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), cet. II, hlm. 172-177.

²⁶ Sri R. Winaningsih, *Politik Kaum Bersarung (Studi Kasus Perilaku Politik Kyai dan Pengaruhnya Terhadap Santri dan Masyarakat)*, Skripsi, Jur. Sosiologi Agama, Ushuluddin, 2005

²⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), cet. II, hlm 307-314.

Pemaparan etnografis Mansurnoor seputar peran dan respon ulama Madura terhadap perubahan-perubahan sosial yang sedang berlangsung di masyarakat desanya, menunjukkan sifat heterogen. Namun ada kecenderungan homogen dalam persepsi dan pemahaman mengenai tantangan dan perubahan di satu sisi, dan hakikat respon pada sisi lain. Dalam masyarakat yang sedang berubah, tiga tipologi ulama ditawarkan Mansurnoor yaitu ulama konservatif, adaptif, dan progresif, yang semuanya berkaitan erat dengan afiliasi kelompok, latar sosial, akses terhadap ide-ide, dan mobilitas sosialnya.²⁸

Dari sekian pustaka yang terpapar dan karya-karya lain yang tidak disebut, penulis berkesimpulan, penelitian tentang relasi sosial ulama sebagai elit Islam dengan elit penguasa formal struktural pasca adanya tuduhan tindakan amoral, dengan mengombinasikan pendekatan relasi Islam, ulama, dan politik (pemerintah) dalam kerangka interaksionisme simbolis adalah riset baru.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian Sosiologi Politik,²⁹ sikap politik (*political attitude*) merupakan salah satu varian pembahasan sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan fase di mana individu mengenali sistem politik, menentukan persepsi, reaksi-reaksi, penilaian, dan sikap-sikap individu terhadap gejala

²⁸ Ik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 390.

²⁹ Penulis mengategorikan kajian penelitian ini dalam ranah subdisiplin sosiologi politik, pasalnya mengkaji konstelasi sosial politik yang terjadi di lapisan masyarakat, khususnya peran ulama dalam mempengaruhi proses sosial politik kabupaten. (Lihat: Hermawan Sulistyo, "Sosiologi Politik, Ruang Lingkup dan Pengembangannya", Jurnal Ilmu Politik Edisi 7, 1990, Jakarta: AIPI, LIPI, dan Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17).

politik yang mengemuka.³⁰ Dalam *International Encyclopaedia of Sociology*, sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana institusi sosial seperti keluarga, lembaga keagamaan, sekolah, media massa, dan lainnya mempengaruhi anggota untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam proses itu individu mempelajari pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan perilaku politik yang relevan untuk berperan menegakkan masyarakat demokratis.³¹ Sementara, Easton dan Dennis menuliskan definisi ringkas mengenai sosialisasi politik sebagai, “suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.”³²

Sedangkan “sikap” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai empat arti yaitu: 1) tokoh atau bentuk; 2) cara berdiri (tegak, teratur, dsb.); 3) perbuatan yang berlandaskan pendirian (pendapat atau keyakinan); 4) pandangan hidup.³³ Dalam terma sosiologi, sikap politik (*political attitude*) adalah “*the positive or negative feelings one has toward the political system. These include attitudes toward public officials, political issues, and the political process itself*”³⁴ (perasaan positif ataupun negatif seseorang terhadap sistem politik tertentu. Ini meliputi sikap terhadap pejabat publik, isu politik, dan proses politik itu sendiri).

³⁰ Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Terj. Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), cet. III, hlm. 23

³¹ Frank N. Magill (Ed.), *International Encyclopaedia of Sociology*, Vol. II, (India, Bhavana Books & Prints, 1990), hlm. 962

³² Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi.....*, hlm. 35-36

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 2, hlm. 838.

³⁴ Frank N. Magill, *International Encyclopaedia.....Loc. Cit.*

Duverger memetakan sikap politik dalam dua aliran: antagonis dan integratif. Aliran antagonis berwatak konservatif karena memandang politik sebagai medan kompetisi antara individu dan kelompok kuat untuk merebut kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan para penguasa sendiri. Sementara, golongan integratif memandang politik sebagai usaha perjuangan/pergolakan untuk menegakkan ketertiban sosial.³⁵ *Background* sosial, politik, dan kultural yang berbeda antara kedua kelompok, sangat berpengaruh atas sikap masing-masing. Dalam konteks Indonesia, menurut Abdillah, sikap intelektual muslim Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terbagi dalam tiga bentuk, yakni akomodatif (reseptif), kritis (resiprokal kritis), dan oposisi (revivalis).³⁶

Sementara kata ulama adalah serapan dari bahasa Arab, bentuk jamak dari *'alimun* yang berarti figur berilmu pengetahuan keagamaan dan kealaman mendalam. Mereka bertugas meneruskan tugas-tugas profetis yang meliputi *tabligh* (menyampaikan wahyu), *tabyin* (menerangkan), *tahkim* (memutuskan problem sosial), dan sebagai *uswah* (teladan).³⁷ Dalam tradisi masyarakat Jawa, istilah ulama diidentikkan dengan Kyai. Padahal menilik arti dasarnya, kata ulama mencakup arti dan spektrum lebih luas yaitu sosok berilmu pengetahuan, tanpa pembatasan spesialisasi ilmu apa pun. Sementara kyai

³⁵ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 2002), cet. IX, hlm. 29

³⁶ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan.....*, hlm. 17

³⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 1993), vol. 5, hal 120

dipersepsi sebagai orang yang menguasai dan berkomitmen dengan keilmuan Islam, serta dalam praktiknya dikokohkan dengan ciri kharismatis.³⁸

Bagi Horikoshi perbedaan sebutan tersebut hanya berkisar pada status dan pengaruh sosial masing-masing. Keduanya bukan hasil capaian pribadi melainkan anugerah masyarakat kepada sosok yang ahli di bidang agama, berintegritas moral, serta kemampuan mendidik.³⁹ Nyaris senada dengan Horikoshi, Geertz memandang bahwa kyai, apa pun sebutannya (tabib, penasihat, guru, maupun ulama) ialah orang-orang yang paling tinggi prestisenya di kalangan umat. Didukung kemampuan ekonomi, status keagamaan dan kekayaan menyatu untuk menghasilkan kelas ahli agama yang dependen, menentukan doktrin serta memegang kekuasaan sosial informal dan tak langsung.⁴⁰

Dari sekian sarjana pengkaji ulama sepakat, kyai atau ulama merupakan lapisan masyarakat yang cukup mumpuni ilmu agama serta memiliki kapabilitas membaca pikiran masyarakat atau jamaah pengikutnya. Selain itu, berbekal kelebihan-kelebihan yang dimilikinya mereka berfungsi dominan dan efektif dalam memersatukan kelompok-kelompok masyarakat. Ulama mampu

³⁸ Imam Suprayogo, *Membaca Citra.....*, hlm. 28. Dalam lintasan sejarah, dahulu tidak ada pemisahan antara ilmuwan agama, ilmuwan alam, dan praktisi politik. Ketiga bidang itu bisa dirangkap sekaligus. Demarkasi ini terjadi pada masa Bani Umayyah (Ensiklopedi Islam, *Loc. Cit.*). Melalui penelitiannya, Horikoshi memaparkan pengertian berbeda antara kyai dengan ulama. Ia berpendapat, kyai adalah elit Islam yang kharismatis di lingkungannya, fasih dan cermat dalam membaca pikiran umatnya, terus terang dalam bersikap, lebih unggul dibanding ulama dalam ber-*ijtihad*, tetapi tidak terikat dengan lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Sementara ulama adalah tokoh agama yang menangani persoalan sosial keislaman, keturunan keluarga ulama, terkait dengan institusi masjid, madrasah, atau pesantren, dan notabene tingkat keilmuan dan kharismanya berada di bawah kyai. Horikoshi, *Kyai dan Perubahan.....*, hlm. 1-3

³⁹ Horikoshi, *Ibid.*, hlm. 3

⁴⁰ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: YIIS dan Dunia Pustaka Jaya, 1981), hlm. 245

memosisikan dirinya sebagai pemimpin lokal yang kharismatis, dianut, serta dipatuhi masyarakat lingkungannya.⁴¹ Kendati dalam penyebutannya, tidak mesti sama antara satu daerah atau komunitas masyarakat di Indonesia.⁴²

Dalam penelitian yang akan mengkaji sikap politik ulama Pekalongan terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, peneliti tidak terikat dengan sebutan-sebutan itu. Apakah oleh umatnya, para ulama dipanggil Kyai atau Ustadz namun mereka adalah sosok yang berpengetahuan keislaman cukup mendalam, kharismatis, dan memiliki pengaruh sosial politik di Pekalongan atau lebih luas.

Riset ini akan mengkaji sikap ulama yang berarti hendak menyingkap dan menginterpretasikan makna subyektif yang diberikan individu atas pilihan sikap dan tindakannya. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik mikroskopik yang menjadi inti dari paradigma definisi sosial.⁴³ Sasaran riset adalah pemikiran dan tindakan sosial politik individu yang bersifat intrasubyektif dan intersubyektif dari aksi dan interaksi sosial, yang tak memisahkan antara pikiran dan tindakan. Masing-masing unsur terpadu secara

⁴¹ M. Iskandar, Shalfiyanti, dkk. *Peranan Elit Agama.....*, hlm. 10

⁴² Di Jawa sebutan untuk ulama adalah Kyai, di Sunda dengan Ajengan, Aceh dengan Teungku, Syekh di Sumatera Utara dan Tapanuli, Buya di Minangkabau, Tuan Guru di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Timur, dan Tengah. (Djohan Effendi, dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, [Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991], hlm. 25). Di kota-kota besar cukup dengan panggilan Ustadz. Di beberapa pesantren, ada panggilan *Hadratu al-Syaikh* untuk “guru besar”.

⁴³ Kajian sosiologi politik konvensional menghadirkan empat pola pendekatan yakni historis (pelacakan karya sosiologi politik klasik), komparatif (perbandingan gejala-gejala sosial politik yang mengemuka di pelbagai kelompok masyarakat), institusional (fokus kajian pada faktor konstitusional dan legalistik seraya mengabaikan realitas perilaku politik), dan behavioral (perilaku: individu sebagai unit analisis. Di sini fakta dan nilai dipisahkan, dan peneliti membuat jeneralisasi berdasar prinsip verifikasi. Periksa: Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. I, hlm. 27-31, dan Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi.....*, hlm. 15-18. Dalam pendapat penulis, keempat pendekatan tersebut tidak relevan untuk mengkaji persoalan dalam riset ini, dan lebih tepat dipakai dalam penelitian kuantitatif.

dialektis. Manusia adalah personal sekaligus sosiokultural, yang bertindak bukan dengan rasio yang terpisah dari tubuhnya, melainkan bertindak dengan menerjemahkan realitas, lalu berekspresi.⁴⁴ Model pendekatan demikian menjadikan individu sebagai unit dasar analisis, karena manusia adalah aktor aktif-kreatif yang menciptakan struktur dan sistem sosial yang nyata.⁴⁵ Meski tidak sepenuhnya menafikan dimensi makro-obyektif yang pasti melingkupi individu-individu informan.

Sebagai bagian dari sosialisasi, sikap politik ulama Pekalongan pun tidak muncul secara spontan seolah dari ruang pikiran hampa, melainkan lahir dari segenap silang sengkabut proses sosial politik yang dialaminya. Sosialisasi diandaikan sebagai proses yang berkesinambungan sepanjang hayat yang terjadi sejak masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Menurut teoritisi interaksionisme simbolik, sosialisasi merupakan proses dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan berpikir untuk mengembangkan cara hidupnya sendiri. Sosialisasi bersifat dua arah (interaktif), di mana individu sebagai pelaku pasif *receiver* informasi, sekaligus aktor kreatif yang menyusun, mengadaptasikan informasi dengan

⁴⁴ Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 71-72. Dengan demikian, peneliti tidak setuju dengan teori “makelar budaya pasif” dari Geertz. Kyai dalam pandangan peneliti adalah filter aktif yang menerima, menyaring (membuang, menafsirkan, menyesuaikan) dan menyampaikan segala kebudayaan “asing” kepada umatnya. Bahkan kemudian menciptakan kultur baru yang lebih relevan dengan kondisi sosialnya.

⁴⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, diterjemahkan dan disadur oleh Alimandan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), cet. 5, hlm. 89-90. Lihat pula: Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet. IV, hlm. 33-35

dirinya, dan mengirim balik informasi.⁴⁶ Interaksi meniscayakan kepaahaman peserta terhadap simbol dan indikasi yang diberikan oleh individu lainnya.

“Kepahaman terhadap simbol” inilah yang mendorong penulis akan memanfaatkan teori interaksionisme simbolis sebagai rujukan analisis teoritis riset ini secara umum. Prinsip-prinsip dasar teori itu secara berurutan yaitu; Manusia dibekali kemampuan berpikir; Kemampuan itu dibentuk oleh interaksi sosial; Dalam interaksi manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkannya mendayagunakan akal pikiran; Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran terhadap situasi; Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan; Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok atau masyarakat.⁴⁷

Lebih ringkas, Blumer (murid H. Mead, pioner interaksionisme simbolis) menetapkan sejumlah asumsi dasar mengenai keterkaitan antara individu dengan realitas sosial yaitu sebagai berikut: 1) Tindakan sosial didasarkan pada makna-makna dan obyek-obyek (fisikal, sosial, abstrak); 2) Tindakan manusia diinterpretasi dan dikonstruksi; 3) Tindakan meliputi diri dan peran sebagai penafsir dan partisipan; Dengan premis-premis tersebut, 3) Organisasi sosial selalu dinamis.⁴⁸ Menurut perspektif ini, masyarakat menggambarkan sebuah simbol (obyek), interaksi, dan proses penafsiran yang dinamis.

⁴⁶ George Ritzer & Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*, terj. Alimandan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. I, hlm. 290

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 289

⁴⁸ Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Terj. Dadang Kahmad, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), cet. I, hlm. 243

Peneliti mengasumsikan, kontroversi sosial yang dipicu kasus oleh gambar tak senonoh, terdiri dari objek-objek yang mesti diartikan dan direpson ulama. Blumer membedakan tiga jenis obyek yaitu objek fisik seperti kursi atau pohon, objek sosial seperti seorang ibu, dan objek abstrak seperti gagasan atau prinsip moral. Objek-objek tersebut dipelajari dan diberi arti oleh individu selama proses sosialisasi, lalu sebagai aktor sosial mendefinisikan dan menetapkan objek tersebut. Sehingga besar kemungkinan, muncul definisi yang berbeda terhadap obyek yang sama.⁴⁹

Di sinilah urgensi penggunaan interaksionisme simbolik. Teori ini akan digunakan menganalisis respon dan sikap politik ulama terhadap kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati pasca kontroversi kasus gambar mesum mereka berdua, yang mana respon dan sikap tersebut bersifat variatif diferensiatif. Interaksionisme simbolik berfaidah untuk menganalisis diferensiasi pemaknaan subyek riset terhadap obyek politik yang sama dalam sebuah interaksi sosial politik. Sebab, baik secara langsung ataupun tidak, seluruh subyek riset pernah berinteraksi dengan Qomariyah sebagai Bupati (atau mantan Wabup) Pekalongan.

Di sini akan digunakan teori interaksionisme simbolik yang dipadukan dengan teori aksi sosial (*social action*) Weber. Dua teori (plus dramaturgi menjadi tiga) yang menurut Ritzer bernaung dalam satu payung paradigma definisi sosial. Weber memahami aksi sosial bersamaan dengan situasi sosial dan rasionalitas yang melandasinya. Berpijak dari asumsi tersebut, ia memilah

⁴⁹ George Ritzer & Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi.....*, hlm. 291

aksi sosial menjadi dua tipe utama, masing-masing terbagi lagi menjadi dua pola: rasional (instrumental dan berbasis *value*), non rasional (tradisional dan afektif).⁵⁰

Untuk membaca tentang fenomena tuduhan amoralitas yang dialamatkan kepada Qomariyah, digunakan dramaturgi yang diperkenalkan oleh Erving Goffman dan teori cap (*labeling*). Dramaturgi berkaitan erat dengan konsep diri, pengaturan kesan, dan peran sosial. Menurut Goffman, manusia menggunakan beragam strategi untuk memperoleh kepercayaan sosial terhadap konsep dirinya. Mengikuti pola analisis ini, masalah utama yang dihadapi individu dalam relasi sosialnya ialah mengontrol kesan-kesan yang diberikannya pada orang lain. Individu selalu berusaha mengontrol penampilannya, keadaan fisik di mana mereka memainkan perannya. Serta perilaku perannya yang aktual dan gerak isyarat yang menyertainya.⁵¹ Jika seseorang menyimpang dari perannya, maka ia akan memperoleh label negatif. Pendek kata, Qomariyah sebagai *public figure* tentunya akan berusaha seoptimal mungkin menjaga citranya sebagai pemimpin formal Pekalongan, muslimah sejati, dan kader NU tulen tatkala berhadapan dengan masyarakat. Di sinilah urgensi dramaturgi. Teori ini akan digunakan menganalisis beberapa cara yang dilakukan oleh Qomariyah untuk menepis stigma (cap negatif) yang melekat pada dirinya lantaran tuduhan kasus amoral tersebut.

⁵⁰ Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma*....., hlm. 141

⁵¹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, Terj. Robert MZ Lawang, (Jakarta: Gramedia 1986), hlm. 42

Sementara teori cap (*labelling*) dipicu oleh adanya standar norma sosial yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Dengan aturan tersebut, masyarakat menciptakan sendiri orang yang menyimpang dengan membuat peraturan-peraturan yang pelanggarannya menimbulkan penyimpangan, dan dengan memperlakukan secara khusus beberapa dari mereka yang bersalah dalam pelanggaran seperti itu. Artinya, kategorisasi penyimpangan muncul dari interaksi sosial bukan spontanitas.⁵² Kriteria untuk menentukan bentuk-bentuk penyimpangan, mencerminkan suatu proses sosial kompleks yang didasarkan pada definisi-definisi subyektif dan penyebaran sumber-sumber yang menimbulkan perbedaan yang memungkinkan kelompok tertentu memaksakan definisinya sendiri pada kelompok lain. Definisi-definisi ini akan berpengaruh pada identitas diri dan sikap mereka yang dicap sebagai penyimpang.⁵³

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan seputar relasi dan sikap politik ulama yang meliputi argumentasi teoretis maupun praktis dan tindakan sosial konkrit atas kontroversi dan perkembangan kasus gambar mesum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang ramai diberitakan sejak pertengahan tahun 2006.

Sebagai pembatasan, penulis memilih ulama yang berafialiasi kepada NU dan Muhammadiyah sebagai subyek penelitian, sebab dua organisasi tersebut memiliki massa terbesar dan memiliki kekuatan otoritatif legitimatif dalam proses sosial politik di Pekalongan yang situasi keagamaannya sangat kuat

⁵² *Ibid.*, hlm. 41

⁵³ *Ibid.*, hlm. 42

hingga dijuluki sebagai kota “Santri”. Secara historis, Islam tidak memiliki tradisi kependetaan seperti dalam Katolik. Tidak ada keharusan mendirikan lembaga pemegang otoritas agama yang ditunjuk resmi dan memperoleh gaji atas jabatannya itu. Dalam masyarakat Islam, elit agama yang kerap menjadi pucuk pimpinan ormas Islam, semata merupakan kreasi masyarakat.⁵⁴

Tetapi dalam perkembangannya, menurut Mulkhan, organisasi tipe demikian menggantikan kedudukan ulama secara personal sebagai pemegang hak tunggal dalam menafsirkan ajaran Islam. Jika dahulu para ulama merupakan monoreferensi berbagai pola perilaku dan sekaligus modus pemenuhan kepentingan massa umat (pengikut), maka kini telah beralih kepada organisasi,⁵⁵ meski tidak sepenuhnya. Hal ini menandakan bahwa kesadaran kolektif semakin memperoleh legalisasi sosial dan membentuk format baru struktur sosial di mana umat bisa memenuhi kepentingannya.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan dari perilaku yang diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh.⁵⁶ Jadi, peneliti

⁵⁴ Imam Suprayogo, *Membaca Citra.....*, hlm. 30-31

⁵⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Sipres, 1999), cet. II, Hlm.13

tidak mengisolasi subyek penelitian dalam suatu hipotesis atau teori tertentu secara baku, namun memandangnya secara holistik. Penelitian kualitatif berupaya menghimpun fakta-fakta dan mengembangkan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan sebisa mungkin menggunakan perspektif emik. Data dan peristiwa hasil observasi akan diinterpretasikan menurut sudut pandang informan bukan sudut pandang peneliti (perspektif etik).

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah ulama yang berafiliasi kepada dua ormas Islam terbesar di Kabupaten Pekalongan yakni NU dan Muhammadiyah. Ulama dipilih mengingat perannya yang strategis di era otonomi daerah. Sedangkan dua ormas tersebut dipilih karena beberapa alasan; a) Isu munculnya konflik laten (tersembunyi) antara dua kelompok besar: NU dan Muhammadiyah yang dipicu kasus ini. Mayoritas warga NU adalah pendukung “Qonco”, sebaliknya sebagian besar warga Muhammadiyah merupakan pendukung “Aqur.”; b) Memiliki basis massa terbesar dan pengaruh sosial politik terkuat di lingkup Pekalongan; c) Mempunyai *mainstream* yang berbeda. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kaum modernis, sementara NU dicitrakan sebagai organisasi kaum tradisional yang berpikiran *salaf*.

2. Lokasi Penelitian

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. XVII, hlm. 3.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan, daerah di mana kasus gambar mesum (calon) Bupati-Wakil Bupati beredar luas dan kemudian memicu kontroversi dalam masyarakat Pekalongan yang nyaris 100 % beragama Islam.

3. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif terbagi dua; informan pangkal yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai beragam sektor masyarakat dan mampu mengantarkan peneliti kepada informan lain yang lebih ahli; dan informan pokok yang ahli tentang pokok masalah yang diteliti.⁵⁷ Kedua jenis informan tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data-data. Penelitian ini menggunakan delapan informan pokok. Empat orang ulama yang berafiliasi ke NU dan empat orang berafiliasi ke Muhammadiyah, baik berstatus sebagai pengurus maupun tidak.

Awalnya, agar penelitian terarah dan tidak melenceng jauh dari pokok masalah, peneliti membuat kategorisasi sikap politik dengan pendekatan relasi Islam dan politik. Pemetaannya adalah: 1) Oposisi kritis (percaya gambar dan menolak keras secara aktif/pasif) sebagai penganut varian organik holistik; 2) Percaya terhadap gambar dan menerima (varian sekular liberal. 3) Percaya atau tidak percaya terhadap gambar dan menyerahkannya terhadap hukum (haluan simbiosis mutualis)

⁵⁷ Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat (ed.), Edisi ketiga, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 130

Namun sampel purposif itu kurang sesuai dengan kenyataan lapangan, hingga akhirnya peneliti mengubah standar informan pokok dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Tokoh atau panutan komunitas/masyarakat di lingkungan atau organisasi sosialnya, dicirikan dengan peran sosialnya yang menonjol atau posisinya yang strategis di organisasi.
- b. Peduli dan paham dengan konstelasi politik lokal Pekalongan.

Karakter-karakter tersebut peneliti simpulkan dari informasi yang diberikan para informan pangkal dan observasi peneliti

Melalui mereka, peneliti percaya bahwa informasi mengenai penelitian ini akan banyak diperoleh dan terjaga akurasinya. Demi menjaga kehormatan dan kepentingan sosial politis para subyek riset dan sebagian atas permintaan mereka, nama-nama mereka akan ditampilkan dalam bentuk inisial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah penggalan dan pengumpulan data yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

A. Observasi

Metode pengamatan langsung dilakukan mengikuti model pengamatan murni, yakni pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan sosial yang sedang berlangsung. Pengamatan dilakukan terhadap sebagian aktifitas yang

melibatkan informan dan sebagian aktifitas keagamaan publik yang diselenggarakan oleh Bupati.⁵⁸

B. Wawancara Mendalam

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan cara berbincang mendalam bersama informan-informan penelitian. Ada dua bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Keduanya dilakukan untuk menggali argumentasi (teoretis maupun praktis) dan sikap politik para informan terhadap kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Pekalongan pasca kasus gambar mesum.

C. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mendata dokumentasi material berkaitan dengan pokok penelitian ini (Pilkadal, kasus gambar mesum, dan sebagainya) terutama yang bersumber dari media massa (berita, artikel, foto, dsb), dan surat-surat organisasi yang berkaitan dengan kasus penelitian ini. Proses ini juga meliputi telaah pustaka atas karya ataupun teks ceramah informan yang terkait dengan pokok penelitian ini, persoalan relasi Islam dan politik, ulama dan politik, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

⁵⁸ Moh. Soehada', *Buku Daras: Pengantar Metode Sosial Kualitatif* (Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 57-58.

Analisis data dilakukan sejak awal penghimpunan data (*on going analysis*) dengan menyeleksi, mengorelasikan setiap data, dan menafsirkannya.

Tahapannya adalah:

- 1) Data yang terkumpul diseleksi dan diedit sesuai dengan ragam pengumpulan data (pengamatan, wawancara, serta kajian dokumentasi dan bahan pustaka) dan ragam sumber (informan dan bahan pustaka), untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian. Pada tahap ini sudah ada reduksi data.
- 2) Selanjutnya dilakukan klasifikasi dengan mengorganisir data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian data ditafsirkan dengan mencerna kandungan makna dalam setiap data, hingga akhirnya dapat diperoleh jawaban dari pokok penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang deskripsi profil sosiologis Kabupaten Pekalongan meliputi sejarah, mitos sosial, kondisi geografis dan demografis, kehidupan sosial budaya, dan dinamika politik lokal di Pekalongan dari masa ke masa.

Bab ketiga, tentang Pilkada Kabupaten Pekalongan. Bab ini menguraikan tentang Pilkada (sejarah dan motifnya) di Indonesia, seputar hiruk pikuk Pilkada Pekalongan, pola relasi Islam dan politik lokal, peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pesta-pesta politik lokal khususnya Pilkada 2006, kronologi peredaran gambar mesum, dan kontroversi serta perkembangan mutakhir kasus gambar mesum.

Bab keempat, membahas respon dan sikap (politik) ulama terhadap kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati pasca kasus gambar mesum. Selain mencatat argumentasi teoretis maupun praktis dan ekspresi nyata (tindakan sosialnya) dari sikap itu, juga mengurai tentang variasi penafsiran mereka terhadap kontradiksi muatan simbol gambar mesum dengan simbol citra diri Qomariyah, dan faktor yang mempengaruhi sikap, dengan interaksionisme simbolis sebagai landasan teoritis. Bab ini berisi jawaban-jawaban atas pokok masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian, saran dan rekomendasi akademis, serta ditutup dengan refleksi kritis penulis.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pilkada langsung perdana Kab. Pekalongan merupakan titik awal kontroversi sosial politik lokal. Adalah foto-foto adegan mesum dengan dua aktor berwajah mirip Qomariyah-Pontjo pemicunya. Muatan gambar tersebut ialah perselingkuhan yang menunjukkan amoralitas sang aktor. Karena pelaku merupakan penguasa politik Pekalongan, wacana amoralitas menjadi alat bagi rival-rival politik untuk melemahkan legitimasi Bupati-Wabup Pekalongan. Merujuk teori *labelling*, proses interaksi sosial telah menciptakan norma-norma dan setiap pelanggarnya dicap sebagai penyimpang. Maka dalam versi penentang, Qomariyah-Pontjo adalah penyimpang sosial (*social deviant*), karenanya tak layak memimpin masyarakat santri. Namun faktor Qomariyah sebagai kader NU, memperoleh dukungan besar dari kalangan *Nahdliyyin*. Tak ayal, perlawanan tersebut rentan memicu konflik sosial meski kekhawatiran itu tidak terjadi.

Dari seluruh uraian yang telah terpapar dari awal, penulis dapat menarik beberapa item kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari pokok masalah riset ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, heterogenitas respon ulama terhadap gambar mesum (percaya-tidak percaya dengan beragam alasannya) berimbis pada keragaman sikap mereka terhadap kasus politik tersebut. Seluruh ulama tampak berhati-hati serta *wait and see* dalam menyikapi kontroversi sosial politik akibat gambar mesum

Bupati-Wabup karena rentan memicu konflik antar kelompok. Meski demikian penulis menemukan variasi relasi ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan terhadap kepemimpinan Bupati-Wabup pasca persidangan perkara penyebaran gambar mesum, terdiversifikasi dalam lima pola: 1) Antagonistis (menolak-pasif); 2) Reseptif (mutlak menerima); 3) Konservatif berbasis primordial (inkar-mendukung penuh); 4) Pasif Konstitutif (pasrah kepada konstitusi); dan 5) Pasif Antagonistis (hati-hati dan menolak bersyarat). Penganut varian antagonistis berpola pikir normatif dalam keagamaan, kritis idealis, dan bersikap oposan terhadap kekuasaan. Sedangkan varian reseptif berpola pikir moderat menjurus liberal dalam hal sosial keagamaan, kritis namun akomodatif terhadap kekuasaan. Pola konservatif berkarakter tradisional atau *salaf* dalam pemikiran keagamaan, memiliki sentimen primordial yang sangat kuat, namun integratif dengan kekuasaan. Model pasif konstitutif berkarakter kontekstual dan realistis dalam pemikiran keagamaan, strategis dan pragmatis dalam perilaku sosial politik, kritis namun akomodatif terhadap kekuasaan. Karakter pasif antagonistis, bergaya pikir tradisional (*salaf*), normatif, namun moderat dalam hal keagamaan, idealis, kritis tetapi akomodatif terhadap kekuasaan.

Kedua, untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pola relasi tersebut, penulis meminjam teori aksi sosial Weber. Merujuk teori itu, rasionalisasi sikap mereka terpilah dalam tiga kategori: rasionalitas instrumental, rasionalitas berorientasi nilai, serta kombinasi rasionalitas bercampur unsur tradisionalitas. F.H, I.D, J.H, dan M.M berpijak pada rasionalitas instrumental. F.H mempertimbangkan faktor sosiologis dalam

bersikap, yakni khawatir mencuatnya *clash* sosial antara warga Muhammadiyah dengan *Nahdliyyin*. Sementara I.D dan M.M dilematis lantaran berhadapan dengan figur yang secara *de jure* adalah pemimpin Kab. Pekalongan. Pasalnya, organisasi yang dipimpin I.D dan pesantren yang diasuh M.M kerap berhubungan dengan Pemkab, baik dalam wujud *supporting* finansial, perizinan, dan sebagainya. Rasionalitas berbasis nilai diikuti oleh R.M, A.R, dan A.H.F. Ketiganya bertekad mengingkari kepemimpinan Bupati-Wabup seandainya tuduhan perselingkuhan itu terbukti di pengadilan. Mereka berpandangan, tindakan tersebut adalah cacat moral. Padahal pemimpin adalah teladan rakyat yang wajib memenuhi standar kesalihan personal dan publik sekaligus. Jika terbukti benar, tentu akan menjadi preseden negatif. Kekuasaan, seperti ditegaskan A.R, adalah “benda” artifisial yang tidak perlu dipertahankan mati-matian. Prinsip dan etika religius lah yang wajib dilestarikan dan diteguhkan. Sementara kombinasi rasionalitas bercampur unsur tradisionalitas, terdapat pada sikap S.Q. Ucapan S.Q bahwa Qomariyah adalah putri kyai besar dan santri tulen sehingga nyaris mustahil berbuat asusila, merupakan ciri khas pemikiran masyarakat tradisional yang mengukuhkan kelaziman mayoritas seraya menepikan kemungkinan minor. S.Q juga mengukuhkan konsep kyai sebagai ahli waris Nabi yang berdaya suprarasional. Sisi kecil rasionalitas instrumental tertangkap dari perkataan S.Q, “saya dekat dengan beliau”. Konotasi “dekat” bisa jadi karena adanya fasilitas maupun *privilege* yang ia terima dari Bupati, walaupun penulis tidak menemukannya langsung. Sementara rasionalitas berbasis nilai terlihat pada

argumentasinya bahwa Qomariyah adalah kader yang konsisten melestarikan tradisi Ahlussunnah wal jamaah. Variasi sikap dan argumentasi di atas teringkas dalam tabel pada bagian akhir kesimpulan.

Ketiga, kendati variatif dalam sikap, namun di tingkatan implementatif, ulama relatif seragam. Sikap mereka sejauh ini masih berupa pendapat belum aplikatif politis. Manifestasi riil (tindakan sosial) yang mampu terlaksana lebih mengarah ke masyarakat berwujud saran petuah kepada jamaah daripada ke Bupati-Wabup. Tidak ada statemen ulama NU dan Muhammadiyah, baik secara pribadi maupun organisasional, yang menuntut penyelesaian kasus atau sekadar meminta klarifikasi kepada Bupati-Wabup. Penulis juga tidak menemukan satu pun dokumen organisasi atau pula pernyataan media massa yang menyikapi kasus ini. Dari fakta tersebut, peran politik ulama sebagai *the agent of power control and social change* dalam kontelasi sosial politik lokal Pekalongan terbilang sangat kecil. Namun yang sangat menggembirakan, kendati kasus tersebut sempat memanaskan kondisi sosial politik Pekalongan, relasi harmonis masyarakat santri Pekalongan tetap terjaga.

Apa pun yang melandasi sikap dan tindakan politik ulama Pekalongan, secara umum dalam tradisi kaum Sunni, relasi ulama dengan politik/kekuasaan memang berwatak ambivalen. Ulama yang bereaksi kritis dan oposan terhadap kekuasaan dianggap tercela. Sebaliknya bila diam atas kemunkaran atau kezaliman penguasa, berhukum haram (dosa). Maka yang paling sering dianut adalah sikap moderat dan antiradikalitas, hingga di satu sisi terkesan oportunis. Tak ayal, kearifan ini oleh penguasa diubah menjadi

alat untuk meredam kehendak faksi penentang. Termasuk dalam kasus Pekalongan.

B. Saran

1. Akademis

Pertama, meneropong kasus politik melalui perspektif sosiologi memang rumit. Kompleksnya persoalan ditambah pelbagai *interest* yang menyelina di balik kasus merupakan penyebabnya. Data obyektif dengan data subyektif sentimentil (pro maupun kontra) bercampur baur. Karenanya diperlukan kecermatan dan kejernihan *researcher*. Obyektifitas secara penuh barangkali mustahil. Namun netralitas peneliti dalam konteks tersebut adalah keniscayaan, demi menjarakkan ilmu sosial dari kepentingan politik praktis pragmatis faksi tertentu, sekaligus menjaga harkat martabat intelektual.

Kedua, untuk memperkaya khazanah dan mempertajam analisis ilmu sosial, kiranya perlu dikembangkan ilmu-ilmu penafsiran seperti hermeneutika, semiotika, dan lain sebagainya di bangku kuliah. Mengingat realitas sosial yang dinamis dan kontekstual rentan menjadi statis, tekstual, bahkan membosankan jika melulu dicandera melalui teori-teori sosial klasik bahkan “modern” sekalipun.

2. Praksis Sosial dan Kebijakan Publik.

Kab. Pekalongan adalah kota santri. Kiranya wajar apabila di Pekalongan terdapat puluhan ulama influensial dan berilmu keislaman mumpuni. Di era otonomi daerah (otoda), kyai berperan strategis dalam pentas politik lokal,

setidaknya pada momentum pemilu legislatif-eksekutif lokal. Dengan kemampuan mobilisasi massa, mereka menjadi tambang suara faksi politik tertentu. Dalam perhelatan Pilkada 2006, sebagian ulama Pekalongan tampak “menikmati” dualisme peran (*polymorphic*), sebagai pelayan sosial keagamaan sekaligus “pemain” politik. Idealnya, sebagai *morality keeper* mereka bertanggungjawab secara moril atas apa pun kebijakan publik sosok pejabat yang dulu didukungnya. Adalah sewajarnya jika mereka menjadi garda depan dalam pengawasan dan *controlling* terhadap aktor penguasa lokal. Ulama tidak haram berpolitik, tetapi semestinya bukan untuk mereguk keuntungan personal. Tetapi politik kerakyatan demi terciptanya kemaslahatan umat. Adapun mekanismenya, ini yang perlu di-*ijma*’-kan.

Tanpa berpretensi mengorek aib privat individu, perkara hukum produksi gambar mesum yang memicu dugaan perselingkuhan Bupati-Wabup Pekalongan mesti dituntaskan. Terbukti ataupun tidak terbuktinya prasangka bukanlah maksud utama. Bukan pula bertujuan politis (mendongkrak atau mengukuhkan *status quo*). Namun demi pendidikan etika sosial-politik warga dan tegaknya demokrasi bermoral. Bagaimanapun, hukum wajib dijauhkan dari tangan-tangan kotor politikus yang hendak menjamah dan mengintervensi hukum demi hasrat temporalnya. Buktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa pandang identitas personal-sosial warga negara! Inilah saat meneguhkan predikat “Santri” dan “Islami” kota Pekalongan. Tidak sekadar dalam ritual simbolis religius (*istighatsah* dan semacamnya), lebih dari itu dalam praksis kebijakan publik.

C. Refleksi Akhir

Citra diri kesalihan Qomariyah dan fakta gambar porno, keduanya sulit dimungkiri. Identitas personal dan citra diri Qomariyah memang menandakan Qomariyah sebagai wanita salihah dan pemimpin Islam ideal. Namun, premis-premis yang mendasarinya lebih bersifat ideologis-mitologis yang layak dipersoalkan. Sementara gambar mesum memang menandakan amoralitas aktor. Tetapi yang mesti dicermati ialah konteks kemunculan foto, yaitu saat suhu makrososial-politik Pekalongan memanans. Maka tanpa menafikan perkembangan persidangan, foto-foto mesum yang tersebar, dan seluruh implikasi sosial, politik, dan hukum yang berkembang mesti dikritisi.

Satu hal yang pasti, “politik adalah ruang profan”. Nyaris tak ada prinsip suci yang sanggup dipertahankan di dalamnya. Tak perlu ada sakralisasi dalam politik. Pun tak ada yang perlu didukung mati-matian dalam ranah politik. *Last but not least*, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Meski temaram, tetap ada secercah cahaya yang bisa dinikmati. Maka lebih baik berikhtiar menjernihkan dibanding memendam kegelisahan tak bermuara.

Daftar Pustaka

Kelompok Buku

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004
- Aditjondro, George Junus, *Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga, Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*, Yogyakarta: LKiS, 2006
- Alfian, Muhammadiyah, *The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989
- Al-Mawardy, Abi al-Hasan al-Baghdady, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, T.t
- Althoff, Phillip, dan Rush, Michael, *Pengantar Sosiologi Politik*, Terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Ayoub, Mahmoud M. *The Crisis of Muslim History, Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, Terj. Munir A. Mu'in, Bandung: Mizan, 2004
- Berger, Arthur Asa *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, Terj. Dwi Mariantono dan Sunarto, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1983
- Bruinessen, Martin Van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS, 1994
- _____, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Ed. & Terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999
- Dhofier, Zamahsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 2002
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*, Terj. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, Jakarta: YIIS dan Dunia Pustaka Jaya, 1981
- Graaf, De Hj., *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, terj. Tim Pustaka Grafitipers dan KITLV, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terj. Umar Basalim & Andi Muarly Sunrawa, Jakarta: P3M, 1987

- Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Iskandar, Shalfiyanti, dkk., *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2000
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Terj. Tim Pustaka Grafiti, Jakarta: Grafiti Pers, 1990
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I dan II*, Terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986,
- Karim, Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik, Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, dari Emporium Sampai Imperium*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Kinloch, Graham C. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Terj. Dadang Kahmad, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat (ed.), Edisi III, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Liddle, R. William, *Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, terj. Nung Katjasungkana Jakarta: LP3ES, 1994
- Lucas, Anton E., *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*, Terj. Tim Pustaka Grafiti, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989
- Magill, Frank N., (Ed.), *International Encyclopaedia of Sociology*, Vol. II, India, Bhavana Books & Prints, 1990
- Mansurnoor, Iik Arifin, *Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990
- Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Marwan, *Peran Politik Praktis Kyai dalam Pemberantasan KKN di Sumenep*, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mughni, A. Syafiq."Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Posisi Teologi Muhammadiyah", dalam Din Syamsuddin (Ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Panjimas, 1990
- Muhni, Djuretna Imam, *Moral & Religi Menurut Durkheim dan Henry Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Muhtadi, Asep Saiful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3ES, 2004
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, Yogyakarta: Sipres, 1999

- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Nawawi, Muhammad ibni Umar al-Jawy, *Tausyih 'Ala Ibni Qasim, Qutu al-Habib al-Gharib*, Beirut: Dar al-Fikri, T.t
- Nurdiyanto, Hanoko, Darto dkk., *Kerusuhan di Pekalongan Jawa Tengah 1995-1999*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004
- Nursa, Shodiqin *Tabiat Buruk Kyai NU, Kasus Kerusuhan Antar Warga NU di Pekalongan*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2005
- Ogburn, William F dan Nimkoff, Meyer F A, *Handbook of Sociology*, London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1960
- Piliang, Yasraf Amir, *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Bandung: Jalasutra, 2003
- Rais, M. Amien *Moralitas Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Dinamika, 1995
- Reading, Hugo F. *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali, 1986
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ridwan, *Paradigma Politik NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, diterjemahkan dan disadur oleh Alimandan, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Ritzer, George & Goodman, Douglass J., *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*, terj. Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Roberts, Keith A, *Religion in Sociological Perspective*, USA: Wadsworth Publishing Company A Division of International Publishing, 1995, 3rd ed.
- Sawiy, Khairuddin Yujah, *Perebutan Kekuasaan Khalifah, Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, Terj. Asmuni M.Th & Imam Muttaqien Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005
- Scharf, Betty R. *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Seligman, Edwin (Ed. In Chief) dan Johnson, Alvin (Ass. Ed.), *Encyclopaedia of the social sciences*, New York: The Macmillan Company, 1954, vol. XII
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Sobur, Alex, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Soehada', Moh., *Buku Daras: Pengantar Metode Sosial Kualitatif* Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Suprayogo, Imam, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN-Malang Press, 2007

- Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Tim Penyusun, Laporan Penyelenggaraan Pemilu 1997: Dokumentasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kab. Pekalongan.
- Tim Penyusun, *Dokumentasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2006*, KAJEN: KPU Kab. Pekalongan, 2006.
- Tim Penyusun, *Kabupaten Pekalongan, Selayang Pandang 1982*, Diterbitkan oleh Pemda Kab. Pekalongan dan Kantor Statistik Kab. Pekalongan, Oktober 1983
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 1993
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991
- Tony S, A. Made. (Ed.), 1996: *Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1997
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Vembriarto, St., *Pathologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984
- Webster, A. Mirriam, Webster *Third New International Dictionary of The English Language Unabridged, With Seven Language Dictionary*, Vol. II H to R, Chicago: 1981
- Wilson, B.R., “Agama dalam Masyarakat Sekuler”, dalam Roland Robertson (ed.), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Ahmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Windhu, I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Kelompok Jurnal dan Makalah Tidak Diterbitkan

- Asfar, M., “Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai”, Prisma, No.5, 1995
- Setyo, Robert, “Fundamentalisme Kristen [Protestan]”, Makalah Seminar “Fundamentalisme”, Dialogue Centre, UIN Yogyakarta, 18 April 2005.
- Shigeru, Sato “*The Pangreh Praja in Java under Japanese Military Rule*”, Jurnal Bijdragen: Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde, 1996, (152:000)
- Sulistyo, Hermawan, “Sosiologi Politik, Ruang Lingkup dan Pengembangannya”, Jurnal Ilmu Politik Edisi 7, 1990, Jakarta: AIPI, LIPI, dan Gramedia Pustaka
- Marjiyanto, Nanang, “Kekerasan Politik: Pemilu 1999 dan Demokrasi di Indonesia”, Majalah Rohani Tahun XLVI No. 5, Mei 1999

Kelompok Koran dan Internet

Pilliang, Yasraf Amir, "Fragmentasi Kekuasaan," Kompas, Rabu, 2 Januari 2008

Rubrik *Fokus* Kompas, Sabtu, 6 Mei 2006, hlm. 33-38

Kedaulatan Rakyat, Minggu, 28-01-2007, hlm. 1

Chandler, Daniel, "Semiotics for Beginners, Signs," <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.html> | last modified: 04/11/2006 21:37:12

_____, "Semiotics for Beginners, Denotation, Connotation and Myth," <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem06.html> | last modified: 03/28/2002;17:21:20

"25 Daerah Masih Bermasalah, Depdagri Optimistis Pilkada Lancar," http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=199644&kat_id=379

"Gugatan Noor Nahar-Tjong Ping Ditolak, Kasus Pilkada Kabupaten Tuban," Suara Merdeka, Rabu, 07 Juni 2006, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/07/nas14.htm>

Nama-nama Bupati / Regent", dalam, http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=105

"Hari Jadi Kabupaten Pekalongan," dalam, http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=105

"Masa Prasejarah", dalam, http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=105

"Masa Mataram Islam", dalam, http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=105

"Pekalongan Mulai Dikenal" http://www.kotapekalongan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=222

"Asal Usul Pekalongan", dalam, http://www.kotapekalongan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=222

"Sejarah Singkat Penentuan Hari Jadi Kota Pekalongan 1 April 1906", http://www.kotapekalongan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=275

"Pemilu 1997, Contoh Terakhir Pemilu Setengah Hati", http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi9/9berita_3.html

"Kuningisasi dan Politik "Koboi" di Jawa Tengah", <http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/47/utama.htm>.

"Melawan "Kuningisasi" Gaya Solo", <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/01/27/0036.html>

"Profil Bupati dan Wakil Bupati", <http://www.pekalongan.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=print&ceid=8-4k>.

Kasus Gambar Mesum

- “Roy: Video yang sekarang palsu,” *Harian Sore Wawasan*, Sabtu 21 Juli 2007, hlm. 1
- “Pemeran berwajah mirip Bupati, Video mesum gegerkan Pekalongan,” *Harian Sore Wawasan*, Rabu 18 Juli 2007, hlm. 1.
- “Kesaksian Roy Suryo, foto saru itu asli, Ditemukan video hubungan intim”, *Harian Sore Wawasan*, 05 September 2007, hlm. 1
- “FPMKS Desak SP3 Kasus Foto, Dialog dengan Kapolres dengan Mulut Diplester,” *Harian Radar Pekalongan*, Sabtu 14 April 2007, hlm 13.
- “Dipertanyakan Kelanjutan Kasus Foto Seronok,” *Suara Merdeka*, Kolom *Suara Pantura*, 14 April 2007, hlm. A
- “Kajen Digoyang Lagi.” “Geger Dugaan Video Seronok Bupati,” “Kapolres: Saya Belum Lihat Video Itu,” *Radar Pekalongan*, Kamis 19 Juli 2007, hlm. 13
- Nirmala Post, Sabtu, 14 April 2007, hlm. 10 & Kamis, 21 Juni, hlm. 10
- Radar Tegal, Sabtu 14 April 2007, hlm. 15
- “Penggugat Cabut Kasus Foto Syur Cabup karena Yakin Kalah”, 12/06/2006 15:46 WIB, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/06/tgl/12/time/154643/idnews/614463/idkanal/10>
- “Kasus Foto Porno Cabup/Wabup Pekalongan Ditangani Polda”, <http://www.gatra.com/2006-05-26/artikel.php?id=94791>
- “Demo Tolak Pelantikan Bupati Nyaris Rusuh. Kasus Bupati Pekalongan”, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/27/nas10.htm>
- “Terdakwa Kasus Foto Mesra Disidangkan di PN Pekalongan”, *Media Indonesia Online*, Kamis, 27Juli, 2006, 07:32WIB, <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=107121>
- “Kasus Foto Syur Cabup Pekalongan Resmi Dihentikan”, Selasa, 13/06/2006, 14:57 WIB, <http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/06/tgl/13/time/200655/idnews/615445/idkanal/10>
- “Qomariyah-Pontjo Diharapkan Dilantik Senin Hari ini”, Senin, 26 Juni 2006, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=147009>.
- “50 Kepala Desa Tuntut Pembatalan Pelantikan Bupati Pekalongan” Kamis, 15 Juni 2006 | 11:19 WIB, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/06/15/brk,20060713-79731,id.html>
- “Direktur PDAM Saksi Foto Seronok, Dua Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Juga Bersaksi, Kamis, 10 Agustus 2006, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/10/jateng/39969.htm>
- “Pengedar Foto Mesum Bupati Jadi Tersangka,” 8 Juni 2006, 14:26 WIB, <http://www.gatra.com/2006-06-08/artikel.php?id=9516>

- “Kasus Foto Porno Cabup/Wabup Pekalongan Ditangani Polda”, <http://www.gatra.com/2006-06-24/artikel.php?id=9572226Mei2006.01:02>.
- “Foto Porno Cabup Pekalongan Diambil dari Kamera HP”, Rabu, 24/05/2006, 17:15 WIB, <http://detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/24/time/171533/idnews/601731/idkanal/39>
- “Pilkada Kabupaten Pekalongan Foto Seronok Diteliti Tim Forensik Polri”, Sabtu, 24 Juni 2006, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/24/jateng/37625.htm>
- “Kasus Foto Seronok Bupati Pekalongan Akan Disidangkan”, Selasa, 04 Juli 2006| 14:08 WIB, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/04/brk,20060704-79731,id.html>
- “Soal foto saru DPRD akan menggunakan hak angket.” 20 Sep 2006 03:46 pm, http://www.wawasandigital.com/indexCAT.php?subaction=showfull&id=1158742019&archive=&start_from=&ucat=9&category=9
- “Bupati dan Wabup diadukan ke DPRD,” 18 Oct 2006 05:27 pm, http://www.wawasandigital.com/indexCAT.php?subaction=showfull&id=1159642017&archive=&start_from=&ucat=9&category=9.
- “Sidang Perkara Foto Seronok, Mantan Bupati Pekalongan Beri Kesaksian”, Rabu, 27 September 2006 :16.52, WIB, <http://suaramerdeka.com/cybernews/harian/0609/27/dar12.htm>
- “Heboh Foto Mesra Bu Bupati dan Wakilnya, 'KATA SUAMI, GAMBAR APA ITU?'”, <http://www.tabloidnova.com/articles.asp?id=11810&no=2>
- “Sidang foto saru Wakil bupati tidak hadir,” 21 Sep 2006 04:02 pm, http://www.wawasandigital.com/indexCAT.php?subaction=showfull&id=1158829355&archive=&start_from=&ucat=9&category=9
- “Kasus Asusila, Beredar, Video Mesum Mirip Bupati Pekalongan” Liputan6 SCTV 18/07/2007 05:39, http://www.liputan6.com/news/?id=144714&c_id=7
- “Kasus foto saru dinilai belum selesai,” Wawasan, Rabu, 02 Januari 2008, http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15869&Itemid=34

Curriculum Vitae

Nama : Muh. Syafik
Tempat /tgl lahir : Pekalongan, 10 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Raya Rembun 360 RT. 01/04 Siwalan Pekalongan
Alamat Sementara : Jl. KH. Ali Maksum 272 Krapyak Yogyakarta
Nama Orang Tua
Bapak : H. Syeirozi (Alm.)
Ibu : Hj. Istiqomah
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Pendidikan Formal

Tahun 1989-1995 : Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah (MIS) Rembun
Tahun 1995-1998 : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Futuhiyyah Mranggen Demak
Tahun 1998-2002 : Madrasah Muallimin-Muallimat Atas (MMA) Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Tahun 2002-2008 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

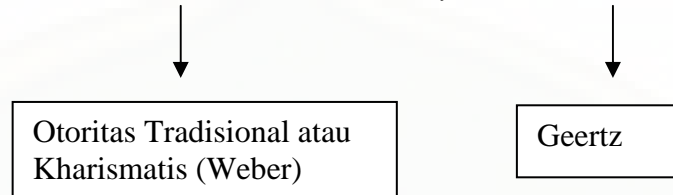
Pengalaman Organisasi:

- Pemimpin Redaksi Buletin Jum'at ***Khazanah***, Lakpesdam-PCNU Kota Yogyakarta (2004-2005)
- Wakil Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ***Arena*** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2007)
- Redaktur Pelaksana Buletin ***Pijar Kehidupan*** Komite Pesantren Anti-Narkoba (KPAN) “Al-Munawwir” Yogyakarta (2005-2007)
- Volunteer *Surveyor* Pesantren di ***Responsible Development International (RDI) Indonesia*** (2006)
- Koordinator Bidang Sosialisasi ***KPAN*** Yogyakarta (2006-sekarang)

Deep Interview Guidance

Grand Thema

Relasi Ulama, Politik, dan Masyarakat Santri



1. Fungsi/Peranan Agama dalam Pentas Politik
 - ⇒ Apakah Legitimasi, *Controlling*, Oposisi kritis, Atau...?
 - ⇒ Simbol-simbol keagamaan dalam praktik atau pesta politik. Apakah manifestasi politisasi Islam? Seperti apakah politisasi Islam?
 - ⇒ Bagaimana Anda memandang politisasi Islam?
 - ⇒ (Khusus untuk Aktifis NU atau Muhammadiyah) Bagaimana Peran Ormas (NU/Muhammadiyah) dalam konstelasi (praktik) politik lokal Pekalongan selama ini? Dalam pesta-pesta politik (Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilkada)? Seperti apa saja? Apa yang menjadi tujuan dalam proses tersebut? Minta dokumentasi bila ada!
2. Fungsi atau Peranan Ulama/Elit Islam dalam pentas politis praktis
 - ⇒ Apa yang diperjuangkan Ulama/ Elit Islam dalam pentas politik lokal Pekalongan? Sedang di Nasional?
 - ⇒ Idealnya peran ulama di hadapan kekuasaan. Legitimatif, korektif, oposan, atau?
 - ⇒ Pengalaman Anda secara riil dalam konteks politik lokal Pekalongan?
3. Etika Politik Pejabat Publik (Pemimpin formal)
 - ⇒ Apakah harus salih secara personal dan publik, atau cukup salah satunya?
 - ⇒ Model kepemimpinan ideal dalam perspektif Islam? Kriteria-kriterianya?
 - ⇒ Apa yang melandasi Anda dalam memilih figur-figur tertentu dalam pesta-pesta politik?
 - ⇒ Bagaimana strategi Anda meyakinkan dan mengajak masyarakat untuk memilih figur tertentu dalam pesta politik itu? Apakah memanfaatkan media atau instrumen keislaman?

4. Tentang Kasus Pekalongan

- ⇒ Bagaimana respon Anda saat awal kali beredar gambar, percaya atau tidak?
- ⇒ Apakah mengikuti atau menyimak detail proses persidangan? Dan perkembangan situasi politik pasca itu?
- ⇒ Percaya, mengapa? Tidak percaya, mengapa? (Konfrontir dengan fakta peradilan! Bukan perzinahan!)
- ⇒ Bagaimana sikap politik Anda? Manifetasi kongkritnya? (Konfontir dengan item kesalihan!)

5. Relasi Islam dan Negara

- ⇒ Bagaimana relasi Islam dan Negara yang ideal menurut Anda (Ajukan teori Sjadzali!)? Tarik ke kasus Bupati!
- ⇒ Setujukah dengan liberalisasi sosial politik?
- ⇒ Jika persidangan membenarkan, Masyarakat Kab Pekalongan liberal?

6. Partisipasi Politik Masyarakat?

- ⇒ Pola partisipasi politik masyarakat secara ideal, sekadar formal prosedural atau substansial?
- ⇒ Dalam hemat Anda, partisipasi politik seperti apa yang berlaku dalam masyarakat Pekalongan? Rendah atau tinggi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi?
- ⇒ Sejauh apa signifikansi partisipasi politik masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pemerintahan Kab. Pekalongan?
- ⇒ Bagaimana strategi Anda mengajak masyarakat sadar politik secara substansial? Seperti apa?

-----&&&&&-----

Tambahan wawancara lain untuk aktor sejarah:

- ⇒ Kasus kerusuhan 1997. Konflik PPP versus Golkar
- ⇒ Konflik massa PKB dan PPP 1999



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Sumbing No. 1 Telp. 0285-381456, 381789 Fax. 381789
KAJEN - PEKALONGAN 51161

SURAT REKOMENDASI

Nomor : Bp. 072/S/99/VII/2007

Dasar : Surat Kepala Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah Nomor: 070/973/VII/2007
perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pekalongan bertindak atas nama Bupati Pekalongan, menyatakan tidak keberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Penelitian/Riset/Survey/ Praktek Magang/Praktek Kerja Lapangan/Orientasi Data dalam wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama | : Muh Syafik |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta |
| 4. Penanggungjawab | : Dr. M. Amin, Lc, MA |
| 5. Maksud Tujuan | : Melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul SIKAP POLITIK ULAMA NU - MUHAMMADIYAH PEKALONGAN TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI - WAKIL BUPATI (studi kasus Qomariyah-Pontjo). |
| 6. Lokasi | : Kabupaten Pekalongan |
| 7. Peserta | : 1 (satu) orang. |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan penelitian/survey/praktek/Orientasi Data tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan penelitian/survey/praktek/Orientasi Data di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah penelitian/Riset/survey/praktek/Orientasi Data selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

Surat Rekomendasi ini berlaku dari : 19 Juli s/d 19 Oktober 2007

Dikeluarkan di : K a j e n

Pada Tanggal : 9 Juli 2007

An. BUPATI PEKALONGAN

Kepala Bappeda Kab. Pekalongan

Us. Kabid Pem&sosbud

Drs. A. APIPUDIN, M.Si

NIP. 500 091 256

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Agama Kab. Pekalongan
2. Kepala BPS Kab. Pekalongan.
3. Kepala KPU Kab. Pekalongan
4. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pekalongan
5. Ketua PC, NU Kab. Pekalongan
6. Ketua PD, Muhammadiyah Kab. Pekalongan
7. Ketua Panwaslu Kabupaten Pekalongan